

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 (REVISI)

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
				Satuan	Jumlah
1		2		3	4
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	43
		2	Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	678
		3	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	186.779
		4	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	40.679
		5	Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer	Rupiah (Juta)	40
		6	Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah	Rupiah (Juta)	59
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	1	Jumlah Program Prioritas yang tercapai sesuai target	Program Prioritas	2
		2	Jumlah Kegiatan Prioritas yang diawasi	Kegiatan Prioritas	7
		3	Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai target	Kegiatan Prioritas	4
		4	Jumlah Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah yang Tercapai Sesuai Target	Program	1
		5	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	80%
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	1	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	9
		2	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BUMD	1
		3	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	23
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100%
		2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	75%
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	1	Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	K/L/Pemda	6
		2	Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	K/L/Pemda	10
		3	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	PemKab/Kota	1
		4	Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Persentase Pemda	1,48%
		5	Tersedianya Rekomendasi Strategis (<i>Policy Brief</i>) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	Rekomendasi	1
		6	Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Persentase Desa	50,00%
		7	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	20
		8	Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	2
		9	Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
				Satuan	Jumlah
1		2		3	4
6	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	76
		2	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	Persen	100
		3	Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100
		4	Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	Persen	100
		5	Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	87
		6	Persentase SPM yang terbit tepat waktu	Persen	91
		7	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	Persen	100
		8	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	-	Baik
		9	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	81
		10	Maturitas SPIP Unit Kerja	Level 1-5	Level 3
		11	Indeks MR Unit Kerja	Level 1-5	Level 3
		12	Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Indeks Skala 100	76
		13	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Indeks Skala 100	73

Kegiatan		Anggaran
1 Pengawasan Pembangunan di Perwakilan	Rp	3.228.047.000
2 Pelaksanaan Dukungan Manajemen	Rp	19.400.462.000
	Rp	<u>22.628.509.000</u>

Jakarta, 23 Agustus 2021

Kepala BPKP

ttd

Muhammad Yusuf Ateh
NIP 19640809 198503 1 001

Kepala Perwakilan


Muhammad Masykur
NIP 19640227 198402 1 001